

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kampung *Heritage* Kayutangan Kota Malang)

Salva Amalia Subekti¹, Slamet Muchsin², Retno Wulan Sekarsari³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: salvaamalia36@gmail.com*

ABSTRAK

Kampung *Heritage* Kayutangan merupakan salah satu Kampung yang konsepnya memiliki sejarah peninggalan colonial belanda yang tempatnya strategis di daerah jalan satu arah kayutangan. Dalam pelaksanaan collaborative governance yang dilakukan oleh tiga stakeholders sudah memberikan banyak dampak dengan meningkatnya UMKM dari masyarakat sekitar kampung heritage kayutangan. Peneliti menggunakan tiga teori utama dalam penelitian ini. Collaborative Governance oleh Ansel Gash (dalam Astuti, dkk., 2020) menjelaskan bahwa Collaborative Governance metode pengelolaan pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan di luar instansi tujuan pemerintah, bermusyawarah dan kesepakatan pengambilan keputusan dengan implementasi program dan kebijakan publik. Teori kedua oleh Wheelen dan Hunger (Abd. Rahman dkk., 2017), yang menjelaskan proses-proses manajemen strategi, yaitu pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Teori yang ketiga oleh Ismayanti (2020) yang menjelaskan dampak pariwisata yaitu, dampak ekonomi, sosial budaya, lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan gaya Miles dan Huberman. Peneliti menggunakan sembilan orang informan mulai dari pemerintah, kelompok sadar wisata, dan masyarakat kampung heritage kayutangan. Kemudian, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dilakukan secara berkelanjutan berbasis masyarakat benar adanya di kampung heritage kayutangan dapat dilihat dengan terlibatnya masyarakat lokal sebagai pelaku UMKM dilokasi wisata. Selain itu dalam collaborative governance, pemerintah Kelurahan Kauman atau intitusi dari luar seperti Dinas Pariwisata Kota Malang, Kementerian PUPR Kota Malang, serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan kelompok sadar wisata, serta pihak swasta berhasil merencanakan serta menjalankan beberapa strategi kedepannya dalam pengelolaan kampung heritage kayutangan. Meskipun demikian, tantangan besar menjadi faktor penghambat dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan, seperti vandalisme, kerusakan infrastruktur, dan peningkatan sampah, masih menjadi kendala yang memerlukan perhatian lebih. Faktor pendukung utama adalah partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama lintas sektor, namun tantangan tetap ada, terutama dari kurangnya keterlibatan sebagian masyarakat, komunikasi yang tidak efisien, serta masalah keamanan dan kebersihan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Berkelanjutan, Berbasis Masyarakat, Kampung *Heritage* Kayutangan

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak aset alam, termasuk keragaman geologi (geodiversity) dan warisan geologi (geoheritage), yang sangat penting untuk pendidikan dan wisata. Pariwisata adalah salah satu potensi ekonomi yang dapat berkembang di beberapa tempat. Dengan menjadi alat pelestari kebudayaan, pariwisata dapat membantu melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal. Pariwisata, menurut A.J. Burkart dan S. Medik (1981) dalam Soekadijo (2000),

didefinisikan sebagai perjalanan untuk sementara waktu dengan tujuan di luar tempat seseorang terkadang tinggal dan bekerja. Salah satu jenis pariwisata nasional adalah mengunjungi daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Menurut UU No. 14 Tahun 2016, Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, peningkatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan pelestarian lingkungan adalah

syarat destinasi pariwisata berkelanjutan. Konflik kepentingan, kurangnya partisipasi masyarakat, degradasi lingkungan, dan ketimpangan distribusi manfaat adalah beberapa masalah tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa kepariwisataan harus mendorong pemerataan, kesempatan berusaha, dan keuntungan, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Keberlanjutan pariwisata di Kota Malang, terutama di Wisata Kampung Heritage Kayutangan, sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi. Pemerintah Kota Malang mengelola Kampung Heritage. Bermula dari seorang anggota dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang mencoba mengembangkan sebuah gagasan untuk mengelola objek wisata tersebut, terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Kampung Heritage telah menjadi kampung wisata bersejarah karena potensi wisatanya yang luar biasa, yang menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Kampung Heritage berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan memiliki luas RT/RW. Meskipun demikian, kampung wisata ini hanya terdiri dari 4 RW: RW 01, RW 02, dan RW 03.

Pariwisata berkelanjutan adalah cara untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, melindungi kekayaan alam dan budaya, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, dalam kenyataannya, pariwisata berkelanjutan menghadapi banyak masalah yang harus diatasi sebelum dapat dicapai.

Pemerintah kota Malang telah menetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018 untuk mengembangkan kawasan strategis di kota Malang, salah satunya dengan menetapkan, mempertahankan, dan merevitalisasi daerah tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah atau cagar budaya yang kuat, sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan produktivitas berdaya saing, terutama di bidang pariwisata.

Pemerintah kota Malang telah menetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018 untuk mengembangkan kawasan strategis di kota Malang, salah satunya dengan

menetapkan, mempertahankan, dan merevitalisasi daerah tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah atau cagar budaya yang kuat, sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan produktivitas berdaya saing, terutama di bidang pariwisata.

Kebijakan dan masalah objek wisata adalah fokus kerja sama pemerintahan. Institusi publik sangat fokus pada pembuatan kebijakan, tujuan, dan proses kerja sama untuk mencapai kesepakatan para pemangku kepentingan. Pemerintah, bisnis swasta, dan masyarakat semuanya harus bekerja sama dan bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat.

Prinsip pembangunan pariwisata Kampung Heritage adalah "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat". Konsep ini diterapkan di setiap tahapan pembangunan pariwisata, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan hingga pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Dalam proses ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat berpartisipasi dalam semua proses pembangunan, baik sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, dan pemantau.

Keterlibatan tambahan seperti sektor swasta dan pemerintah sangat penting dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga sumber daya budaya dan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata. Untuk itu, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan objek wisata Kampung Heritage Kota Malang, pemerintah harus memotivasi dan mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

Pemerintah harus mengelola Wisata Kampung Heritage Kayutangan dengan baik karena ada banyak orang yang bekerja di sana, menjual barang, dan menjaga keamanan kampung agar wisatawan merasa aman saat berkunjung. Selain itu, kampung harus tetap bersih. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat apa yang harus dilakukan untuk mengelola Kampung Warisan Kayutangan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Akibatnya, Kampung Heritage menghadapi tantangan untuk bekerja sama. Masyarakat kurang senang dengan pembentukan Kampung Warisan di wilayah RW 02. Mereka juga tidak mendukung dan bekerja sama dengan kelurahan dalam hal pengelolaan objek wisata di Kampung Warisan. Berdasarkan

masalah di atas, penulis ingin menyelidiki "**Governance Kolaboratif dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (Studi di Kampung Peninggalan Kayutangan).**"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengelolaan objek wisata berbasis *Collaborative Governance* ?
2. Bagaimana dampak pengelolaan objek wisata berbasis *Collaborative Governance* ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan objek wisata berbasis *Collaborative Governance* ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pemanfaatan strategi kolaborasi di dalam pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang.
2. Untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis pengaruh kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang.
3. Untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kolaborasi pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang, dengan tujuan meningkatkan kualitas kolaborasi di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memahami teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
2. Manfaat Praktis
Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata. Penelitian ini juga dapat menyumbangkan ide dan tindakan nyata untuk pengembangan Wisata Kampung *Heritage* Kayutangan di Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian Shinta Alisa Primasari (2023) berjudul "Dampak Pembangunan Wisata Kayutangan Heritage Terhadap

Kawasan Kumuh di Daerah Kayutangan Kota Malang (Studi Kasus Zona II Wisata Kayutangan Heritage Kota Malang)," terdapat dukungan dari masyarakat lokal dan pendatang, di mana masyarakat lokal turut berperan dalam mempromosikan dan mendukung program pengentasan wilayah kumuh di wisata Kampung Heritage. Namun, terdapat hambatan berupa pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait kurangnya sosialisasi serta minimnya keterlibatan ahli, yang terlihat dari pembangunan trotoar yang dibongkar pasang beberapa kali.

2. Dalam penelitian Fadlurrahman (2022) yang berjudul "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur," ditemukan bahwa struktur jaringan para pemangku kepentingan tidak terorganisir dengan baik (self governance) dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Akibatnya, dimensi-dimensi collaborative governance lainnya tidak berjalan secara optimal.
3. Dalam penelitian Tariza Noviranti Muhaling (2020) yang berjudul "Pengembangan Objek Wisata Pantai Batu Bengkung Kabupaten Malang Dalam Perspektif Collaborative Governance," Collaborative Governance mencakup empat aspek: 1) face to face, yang melibatkan komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan objek wisata, 2) trust building, di mana Perum Perhutani membangun kepercayaan dengan menjadikan LDMH Tani Maju sebagai mitra pengelola Pantai Batu Bengkung, dan LDMH Tani Maju kemudian membangun kepercayaan dengan masyarakat, 3) commitment to process, di mana LDMH Tani Maju berkomitmen bersama Perum Perhutani dalam pengembangan objek wisata, dan 4) shared understanding, yang diwujudkan melalui agenda rutin tahunan untuk memberikan pemahaman terkait perjanjian kerjasama yang diperbarui setiap tahun.
4. Dalam penelitian Kurnia Alvin Syahputra (2018) yang berjudul "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar)," terdapat empat aspek dalam Collaborative Governance: a) Assessment (Penilaian), yang mencakup potensi wisata Pantai Serang serta adanya perselisihan antara pemerintah dan Perum

Perhutani terkait kewenangan lahan di lokasi wisata, b) Initiation (Inisiasi), di mana kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Blitar, Perum Perhutani, dan Pemerintah Desa mendapat respon positif serta tindakan nyata dalam pengelolaan destinasi wisata Pantai Serang, di mana ketiga aktor telah memenuhi kebutuhan dalam *collaborative governance*, c) Deliberation (Musyawarah), di mana dalam musyawarah tersebut, para pemangku kepentingan membahas dan menyepakati aturan dasar dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Blitar, Perum Perhutani, dan Pemerintah Desa untuk pengelolaan destinasi wisata, dan d) Implementation (Penerapan), di mana ketiga aktor menunjukkan tanggung jawab terhadap kolaborasi yang terjalin. Pemerintah Kabupaten berperan sebagai fasilitator dan mediator, Perum Perhutani sebagai penyedia lahan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas, dan Pemerintah Desa Serang sebagai pengelola wisata yang berkoordinasi dan mendapat dukungan dari pokdarwis sebagai sumber daya manusia pengelolanya.

5. Dalam penelitian I Putu Gede Richo Tuisnayana Putra (2022) yang berjudul "Implementasi *Collaborative Governance* Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli," peran pemerintah dalam pengelolaan wisata telah membuka peluang bagi sektor swasta dan masyarakat. Inisiatif swasta dalam pengelolaan wisata mencakup menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pengunjung ke kawasan Taman Wisata. Selain itu, terdapat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang melalui penyediaan ruang bagi mereka untuk membentuk kelompok yang terlibat dalam pengelolaan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan analisis data yang diperoleh di lapangan dalam kondisi alamiah. Moleong (2016:6) juga menyatakan bahwa "penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik, dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah tertentu, menggunakan

berbagai metode ilmiah." Oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan deskriptif untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi saat ini dan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang akan disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Dengan demikian, peneliti dapat memahami bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat, strategi pengelolaan yang diterapkan, dampak dari wisata berbasis masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberlanjutan wisata berbasis masyarakat di Kampung Heritage Kayutangan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian mencakup rincian pertanyaan yang merinci cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Menurut Moleong (2006:7), fokus penelitian adalah pusat perhatian yang dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi penyimpangan dalam persepsi dan kajian masalah.

Hal ini membantu peneliti memahami arah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, fokus penelitian memastikan bahwa setiap langkah penelitian dilakukan dengan tujuan yang jelas dan terukur. Terdapat fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

- 1) Kolaborasi pengelolaan Objek Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan : kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaboratif (dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, hasil antara)
- 2) Strategi *Collaborative Governance* yang akan dilakukan oleh masyarakat lokal, kelompok sadar wisata, dan aparat Kelurahan Kauman, pihak swasta dalam mengelola wisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan : pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol.
- 3) Dampak yang dihasilkan dari *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh masyarakat lokal, kelompok sadar wisata, dan aparat Kelurahan Kauman, pihak swasta dalam mengelola wisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan : dampak ekonomi, dampak sosial budaya, dan dampak lingkungan berkelanjutan.
- 4) Faktor pendukung dan penghambat *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan.

Situs dan Latar Penelitian

Peneliti memilih dua lokasi untuk penelitian ini. Lokasi pertama adalah objek wisata Kampung Heritage Kayutangan, yang terletak di Jalan Jendral Basuki Rahmat, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi kedua adalah Kantor Kelurahan Kauman, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan Kampung Wisata Heritage Kayutangan, beralamat di Jalan KH. Ashari No. 21 A, Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterlibatan Pemerintah Kelurahan Kauman dalam manajemen objek wisata untuk pertama kalinya, yang memberikan kesempatan unik bagi peneliti untuk mengamati dan menganalisis cara mereka mengelola dan mengeksplorasi peluang dalam industri pariwisata, serta bagaimana mereka menerapkan strategi pengelolaan. Kampung Heritage menjadi fokus utama dalam pengembangan objek wisata di Kayutangan karena keunikan yang dimilikinya dibandingkan kampung wisata lainnya, serta potensi wisata dari bangunan bersejarah yang menjadi peluang besar bagi kawasan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih lokasi ini guna mendalami peran Collaborative Governance dalam pengelolaan objek wisata, mengingat keterlibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah, sehingga pemilihan lokasi mencakup instansi pemerintah dan non-pemerintah di Kampung Heritage Kayutangan.

Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah ringkasan dari berbagai informasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Data ini akan dikumpulkan oleh peneliti dengan berbagai metode yang akurat terkait dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Kampung Heritage Kayutangan. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber informasi, yaitu informan dan key informan. Informan adalah individu yang memberikan data dalam penelitian, sementara key informan adalah individu yang dianggap peneliti dapat memberikan informasi paling relevan sesuai dengan masalah pokok penelitian. Key informan dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Kelurahan Kauman, Ketua RW 01, Ketua RW 02, Ketua RW 09, Ketua RW 10, dan Ketua POKDARWIS. Sedangkan informan

lainnya mencakup pihak swasta dari PT. Dulux, anggota POKDARWIS yang terlibat dalam Sie Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif, serta masyarakat lokal.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan berfungsi sebagai pelengkap untuk mendukung penelitian. Dengan kata lain, peneliti memperoleh data sekunder ini dari berbagai sumber yang tersedia untuk membantu menyelesaikan penelitiannya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal, website tentang Kampung Heritage Kayutangan, serta softfile mengenai Kelurahan Kauman dan kelompok sadar wisata Kampung Heritage Kayutangan yang berhasil diperoleh oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan narasumber yang dipilih sebagai responden atau informan dalam penelitian, di mana pertanyaan diajukan dan jawaban diperoleh secara langsung. Metode ini digunakan untuk menggali data secara mendalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan-informan terpilih, dan wawancara dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung. Melalui observasi, peneliti dapat secara langsung mengamati fenomena atau permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Selain mengamati fakta yang diperoleh dari informan, observasi ini dilakukan peneliti untuk secara langsung melihat kondisi dan situasi di Kampung Heritage Kayutangan. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti mencatat berbagai data secara sistematis. Pada penelitian ini, observasi dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang sudah diperoleh. Peneliti mengamati beberapa aspek di Kampung *Heritage* Kayutangan, seperti kondisi lingkungan masyarakat, area penambahan lukisan atau spot kuno, serta program kolaborasi yang berlangsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil gambar selama

peneliti melakukan penelitian. Peneliti mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan, mulai dari wawancara hingga observasi di lokasi penelitian. Dokumentasi berfungsi untuk memberikan bukti nyata dan autentik kepada pembaca mengenai penelitian, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap penulisan yang dilakukan di objek wisata Kampung *Heritage* Kayutangan. Dalam praktiknya, dokumentasi hanya menggunakan teknologi, menjadikannya teknik pengumpulan data yang praktis bagi peneliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi: dokumentasi dengan informan, dokumentasi tempat yang disebutkan oleh informan, serta dokumentasi kondisi lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan ketika data empiris yang diperoleh berupa kumpulan kata-kata, bukan angka. Data ini bisa dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, ringkasan, dokumen, atau rekaman. Data tersebut biasanya diproses terlebih dahulu (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau penulisan) sebelum dapat digunakan. Namun, analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang diorganisir dalam bentuk teks yang lebih rinci, tanpa memanfaatkan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat bantu analisis. Seperti yang dijelaskan oleh Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014), analisis ini melibatkan tiga arus kegiatan utama yang berlangsung secara bersamaan, antara lain :

1) Reduksi Data

Reduksi data melibatkan proses merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal penting serta mencari tema dan pola. Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16), di mana teknik analisis data ini melibatkan pengorganisasian data menjadi pola, kategori, dan unit dasar deskripsi. Dengan diskusi, wawasan peneliti berkembang lebih jauh setelah mereduksi data yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Setelah wawancara, peneliti mendokumentasikan informasi yang didapatkan, dan kemudian melanjutkan dengan observasi di lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

2) Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Setelah proses reduksi data selesai, peneliti melanjutkan dengan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif,

data disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 249:2013).

3) Penarikan Kesimpulan

Proses akhir dalam analisis data melibatkan penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif ini menghasilkan wawasan baru yang sebelumnya belum terungkap. Berdasarkan data yang diperoleh, disimpulkan bahwa telah terjadi berbagai bentuk kolaborasi berbasis masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan, melibatkan Pemerintah Kelurahan Kauman, kelompok sadar wisata Kampung *Heritage*, serta pihak swasta terkait. Selain kolaborasi internal, juga terjalin kolaborasi eksternal, seperti dengan instansi luar kampung, Dinas Pariwisata Kota Malang, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan Dinas PUPR Kota Malang. Strategi pengelolaan yang dirancang oleh pemerintah kelurahan, kelompok sadar wisata, dan pihak swasta bertujuan untuk memajukan Kampung *Heritage* Kayutangan sebagai destinasi wisata berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, kolaborasi ini dihadapkan pada berbagai faktor pendukung maupun penghambat, baik dari segi internal maupun eksternal. Para aktor yang terlibat, baik dari Pemerintah Kelurahan Kauman, kelompok sadar wisata, maupun pihak swasta, terus bekerja sama dalam merancang strategi untuk mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut.

Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menguji akurasi informasi yang diterima agar benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, keabsahan data berkaitan dengan sumber permasalahan penelitian mengenai Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan. Penelitian ini akan menerapkan triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data, dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai pengecekan atau perbandingan. Selain itu, triangulasi juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2015:273), terdapat tiga jenis triangulasi dalam keabsahan data pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber adalah metode untuk menguji kredibilitas data dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks

- ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang terlibat dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan, termasuk pegawai dan masyarakat yang sedang berkunjung. Informasi yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari dokumentasi hasil observasi.
2. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik adalah metode untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan informan, seperti Perangkat Kelurahan Kauman dan masyarakat lokal di Kampung *Heritage*. Data yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui dokumentasi hasil observasi, sebelum peneliti menarik kesimpulan.
 3. Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu adalah metode untuk memvalidasi data dengan memeriksa informasi pada waktu yang berbeda. Waktu dapat memengaruhi keandalan data yang diperoleh. Peneliti mengikuti jadwal para informan, menyadari bahwa mereka memiliki kesibukan lain. Dengan menyesuaikan diri dengan jadwal informan, peneliti dapat melakukan penelitian tanpa mengganggu mereka dan lebih leluasa dalam pengumpulan data. Dari ketiga teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data, peneliti dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan triangulasi sumber dengan mencari kebenaran dari dokumen kearsipan terkait program pengelolaan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat, serta melakukan wawancara dengan narasumber selama jam kerja agar pertanyaan wawancara dapat dijawab dengan baik.

Pembahasan

Kolaborasi yang dilakukan Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta dalam pengelolaan objek wisata berbasis *Collaborative Governance*

Kolaborasi, dalam pengertian proses, merujuk pada serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk mengatur atau mengelola secara institusional. Pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini berfungsi sebagai mitra dan rekan kerja untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang saling menguntungkan, dengan tujuan menghasilkan barang dan layanan. Untuk mencapai tujuan yang optimal dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*, Ansell dan Gash (Retno Sunu Astuti dkk, 2008)

mengemukakan model teori *Collaborative Governance* yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi (yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, serta hasil antara).

1. Kondisi Awal

Kondisi awal berfungsi sebagai syarat dasar untuk menentukan keputusan berkolaborasi antara para pemangku kepentingan, lembaga, dan pemegang saham yang diperlukan untuk membangun kerjasama. Penerapan *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan telah membawa dampak yang signifikan, terutama dalam pengembangan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Malang. Sebelum kolaborasi dilakukan, kampung ini terlihat kurang menarik dan hanya dianggap sebagai area biasa dengan bangunan kuno yang sederhana. Namun, dengan adanya kerjasama yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, kampung ini berhasil bertransformasi menjadi salah satu objek wisata utama di Kota Malang, dengan daya tarik yang jauh lebih besar berkat pemanfaatan potensi rumah-rumah tua bersejarah.

Di pihak pemerintah, kolaborasi ini mengalihkan perhatian dari penanganan masalah permukiman kumuh menuju pertumbuhan sektor pariwisata. Pemerintah mengakui pentingnya nilai sejarah desa dan mendukung upaya untuk mempromosikan Kayutangan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Malang. Hal ini menunjukkan bahwa *collaborative governance*, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dapat menghasilkan perbaikan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, konsep *Hexa-Helix* digunakan untuk meningkatkan kompleksitas pengembangan masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan. Strategi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor bisnis, akademisi, masyarakat, media, dan lembaga keuangan seperti bank. Dukungan yang luas dari pihak luar, termasuk Sandiaga Uno dan lembaga perbankan, menunjukkan bahwa kolaborasi antar sektor berhasil meningkatkan infrastruktur dan daya tarik pariwisata desa.

2. Desain Kelembagaan

Menurut Ansell dkk. (2008), desain kelembagaan merujuk pada cara aturan dasar kolaborasi ditetapkan. Desain ini mencakup bagaimana aturan main

berkontribusi pada kolaborasi, cara forum dibentuk, serta adanya aturan pelaksanaan yang jelas dan transparansi dalam implementasi kolaborasi. Di Kampung *Heritage* Kayutangan, penerapan *collaborative governance* dilakukan melalui berbagai prosedur formal dan informal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sebagian besar kerja sama di daerah tersebut bersifat fleksibel dan tidak diatur oleh norma formal yang ketat.

Beberapa pihak menyatakan bahwa kolaborasi biasanya berlandaskan pada kesepakatan informal dan adat lokal yang disepakati bersama. Secara keseluruhan, penerapan *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan menggabungkan teknik formal dan informal. Dalam hal ini, pemerintah dan organisasi terkait berfungsi sebagai fasilitator, sementara masyarakat lokal memainkan peran krusial dalam pengelolaan wisata. Upaya kolaboratif di antara berbagai pemangku kepentingan ini memastikan keberlanjutan dan kesuksesan Kampung *Heritage* Kayutangan sebagai objek wisata berbasis masyarakat dalam jangka panjang.

3. Kepemimpinan

Menurut Ansell dkk (2008), kepemimpinan yang efektif mencakup penetapan dan penegakan aturan dasar yang jelas, pembangunan kepercayaan, fasilitasi dialog, dan evaluasi keuntungan bersama. Pemimpin berperan sebagai penghubung, memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pengelolaan Kampung *Heritage* Kayutangan. Selain itu, pertemuan rutin bulanan dengan Pokdarwis serta tinjauan kegiatan yang dilakukan secara berkala merupakan alat penting untuk menjamin kemitraan yang berkelanjutan. Dalam konteks *collaborative governance*, pertemuan ini menyoroti pentingnya komunikasi yang konsisten dan transparan untuk mendukung kerja sama yang efektif.

Kepemimpinan di Kampung Wisata Kayutangan juga ditunjukkan melalui dukungan material yang nyata. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rokhim, sosok pemimpin seperti Sandiaga Uno memberikan bantuan berupa sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan fasilitas pariwisata, seperti cat Dulux. Dukungan materi ini sangat krusial dalam meningkatkan kolaborasi karena memberikan fondasi yang kokoh untuk inovasi dan pertumbuhan fasilitas

pariwisata. Secara keseluruhan, penerapan *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan berhasil mengintegrasikan berbagai elemen penting, termasuk komunikasi yang terbuka, pertemuan rutin, distribusi sumber daya yang adil, dan dukungan material yang nyata. Kolaborasi yang efektif antara pemimpin dan pemangku kepentingan berkontribusi pada pengelolaan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Akhirnya, ini tidak hanya menghasilkan pengelolaan pariwisata yang lebih efisien, tetapi juga memperkuat hubungan yang lebih erat dan harmonis antara masyarakat, pengelola pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Proses Kolaborasi

a) Dialog Tatap Muka

Menurut Ansell dkk 2008 dialog tatap muka ini merupakan suatu tahap kerjasama yang disebut dialog atau komunikasi tatap muka. Tahapan ini penting untuk keberlanjutan dalam mencapai tujuan. Penerapan *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan berupa dialog antar pemangku kepentingan terjadi secara berkala, dengan frekuensi berkisar antara sebulan sekali hingga tiga bulan sekali, tergantung pada konteks dan topik yang dibahas. Meskipun pertemuan formal tidak selalu direncanakan dengan matang, penggunaan alat komunikasi informal seperti WhatsApp memudahkan arus informasi dan mewujudkan prinsip dasar tata kelola kolaboratif, yaitu komunikasi yang terbuka dan fleksibel.

Praktik *collaborative governance* di desa ini mencakup kolaborasi lintas sektor. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pengelola, dan pemerintah daerah semuanya berpartisipasi aktif dalam proses diskusi. Namun, keterlibatan masyarakat setempat dalam dialog tersebut harus diperkuat. Wawancara dengan berbagai penduduk setempat mengungkapkan bahwa tidak semua orang terlibat aktif dalam dialog pemangku kepentingan, seperti yang diakui oleh Bapak Purwanto bahwa ia tidak pernah berpartisipasi. Hal ini menekankan kesulitan inklusi atau keterlibatan masyarakat, yang merupakan komponen penting dari pendekatan tata kelola kolaboratif. Lebih jauh, komunikasi antar pemangku kepentingan tidak hanya berfokus pada isu operasional sehari-hari seperti kebersihan, keselamatan, dan kedatangan pengunjung, tetapi juga pada pertumbuhan jangka panjang. Diskusi yang mencakup penilaian aktivitas saat ini dan

perencanaan tahap pengembangan di masa mendatang.

b) Membangun Kepercayaan

Selain itu, komunikasi antara pemangku kepentingan tidak hanya terfokus pada masalah operasional sehari-hari, seperti kebersihan, keselamatan, dan kedatangan pengunjung, tetapi juga mencakup aspek pertumbuhan jangka panjang. Diskusi melibatkan evaluasi aktivitas yang sedang berjalan dan perencanaan untuk tahap pengembangan di masa depan. Kinerja yang baik dan akuntabilitas dianggap sebagai elemen penting dalam membangun kepercayaan. Ketika para pemangku kepentingan menyaksikan bahwa setiap pihak melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional dan dengan standar tinggi, kepercayaan antara mereka akan semakin kokoh.

Partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis dalam pengelolaan objek wisata menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang menumbuhkan rasa memiliki dan akuntabilitas terhadap hasil kolaborasi. Kesadaran kolektif dan dukungan bersama sangat penting untuk menjaga interaksi yang harmonis di antara para pemangku kepentingan. Konsistensi dalam kualitas pekerjaan menunjukkan bahwa komitmen untuk menghasilkan output berkualitas tinggi dapat menciptakan saling menghormati. Dengan landasan kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan aktif, kerja sama di Kampung *Heritage* Kayutangan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan yang ada, menghasilkan keberhasilan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

c) Komitmen

Untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai setelah melalui tahap persiapan, perencanaan, dan implementasi, penting untuk memberikan perhatian serius kepada semua pemangku kepentingan. Menurut Ansell dan Gash (Retno Sunu Astuti dkk, 2008), hal ini termasuk menjaga kebersihan dan keamanan masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama. Penggunaan alat komunikasi seperti WhatsApp untuk menyebarkan informasi dan memotivasi masyarakat adalah contoh penerapan teknologi dalam kolaborasi.

Komunikasi yang efektif merupakan elemen krusial dalam tata kelola kolaboratif, karena memastikan bahwa

semua pemangku kepentingan memperoleh informasi yang diperlukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam kerja sama dapat dilihat dari kewajiban untuk menandatangani notulen rapat, yang memastikan bahwa setiap individu memahami perannya dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dukungan dari pihak eksternal, seperti PT. Dulux yang menyediakan produk berkualitas tinggi dan memungkinkan terjadinya komunikasi terbuka, menunjukkan pentingnya kontribusi eksternal dalam tata kelola kolaboratif. Semua variabel ini saling mendukung untuk mendorong kolaborasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan aset budaya yang berkelanjutan.

d) Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama adalah proses untuk mencapai kesepahaman dan bekerja sama demi mencapai hasil yang telah disepakati, serta untuk mencegah terjadinya konflik. Semua pihak yang terlibat dalam sistem tata kelola kolaboratif perlu memahami satu sama lain, menurut Ansell dan Gash (Retno Sunu Astuti dkk, 2008). Proses pembelajaran mengenai kerja sama tim berlangsung dengan baik, meskipun ada beberapa kekurangan yang tidak menghalangi usaha kolektif dalam mengelola Kampung *Heritage*. Pemahaman yang mendalam antara pihak berwenang, pemimpin komunitas, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan yang efektif.

Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah penekanan pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi yang efektif dan saling mendukung di antara semua pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, penerapan tata kelola kolaboratif di Kampung *Heritage* Kayutangan menunjukkan hasil yang positif, di mana komunikasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

e) Hasil Antara

Ketika tujuan dan manfaat dari kolaborasi dapat dirasakan, meskipun dalam skala kecil, ini mencerminkan hasil

sementara dari proses kerjasama. Tindakan pemerintah kota dan Pokdarwis, serta partisipasi mitra eksternal seperti CSR dan akademisi, telah berkontribusi dalam revitalisasi desa tersebut. Upaya bersama ini tidak hanya mempercantik lingkungan desa, tetapi juga meningkatkan daya tarik ekonominya bagi wisatawan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai alokasi dana pariwisata, setiap pihak dapat merasakan manfaatnya, yang menekankan prinsip keadilan sosial dalam proses pemerintahan. Pembagian dana bulanan sebesar 10.000 rupiah kepada 802 rumah tangga mencerminkan keberhasilan model koperasi ini dalam meningkatkan ekonomi lokal.

Selain itu, kolaborasi ini juga telah menghasilkan visi bersama di antara masyarakat. Keterlibatan aktif warga dalam pengembangan objek wisata baru telah meningkatkan daya tarik desa dan memperkuat identitasnya sebagai destinasi wisata. Contoh ini menunjukkan bagaimana penerapan tata kelola kolaboratif yang efektif dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan dan perluasan kawasan wisata, yang bisa dijadikan acuan bagi daerah lain.

Strategi yang dilakukan Pemerintah, Kelompok Sadar Wisata dan Pihak Swasta Dalam Pengelolaan Objek Wisata berbasis Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2008:40), definisi *collaborative governance* merujuk pada metode pengelolaan pemerintahan yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program publik. Dalam konteks Administrasi Publik, *collaborative governance* merupakan model strategi baru yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam forum bersama dengan aparatur pemerintah, untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi secara individual tanpa melibatkan pemerintah.

1. Pemerintah

Menurut Ansell dan Gash (dalam Astuti, dkk., 2020:134), *collaborative governance* adalah metode pengelolaan pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan di luar instansi pemerintah, dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan serta implementasi program dan kebijakan

publik. Dalam pengelolaan Kampung Wisata *Heritage*, Pemerintah Kelurahan Kauman sebagai *stakeholders* utama bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan objek wisata, sekaligus merumuskan strategi untuk mendukung pengembangan kawasan ini. Salah satu bentuk penerapan *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan adalah melalui peran Pemerintah Kelurahan Kauman sebagai penghubung antara masyarakat dan Pemerintah Kota Malang. Sebagai perancang strategi, Pemerintah Kota Malang berfungsi sebagai fasilitator dalam pengelolaan pariwisata, yang tentunya berdampak langsung pada masyarakat di sekitar Kampung *Heritage* Kayutangan.

Peran Rukun Warga (RW) sebagai entitas pemerintahan terkecil sangat signifikan dalam mengembangkan potensi pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat, yang didukung penuh oleh berbagai pemangku kepentingan di Kampung *Heritage* Kayutangan. Selain itu, Pemerintah RW juga merancang strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan berbasis *collaborative governance* yang lebih fokus pada perekonomian masyarakat, dengan menekankan pada pelestarian dan pemanfaatan potensi yang ada di Kampung *Heritage*. Hal ini mencakup peningkatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas dan keterampilan di bidangnya.

2. Kelompok Sadar Wisata

Pengertian *governance* mencakup lebih dari sekadar keterlibatan lembaga publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan; hal ini juga melibatkan partisipasi berbagai organisasi dalam mencapai tujuan publik (Retno Sunu, Astuti dkk, 97:2020). Pokdarwis berperan dalam melibatkan masyarakat lokal serta berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan yang mendukung keberlanjutan Kampung *Heritage*. Dengan mengadakan pelatihan dan *workshop*, Pokdarwis tidak hanya meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki peran aktif dalam pengembangan dan pengelolaan kampung mereka sendiri.

Pelatihan dan *workshop* yang berbasis masyarakat ini merupakan bentuk pemberdayaan yang krusial dalam konteks *collaborative governance*. Inisiatif ini memungkinkan masyarakat untuk

memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kampung mereka secara berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk mendiversifikasi produk wisata dan mengembangkan oleh-oleh khas yang melibatkan UMKM lokal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut.

3. Pihak Swasta

Dalam pelaksanaannya, Kampung *Heritage* Kayutangan menjalin kerja sama dengan PT. Dulux, yang merupakan bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bertujuan untuk memberikan kontribusi jangka panjang dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. CSR adalah salah satu inisiatif keberlanjutan di kalangan perusahaan yang berfokus pada memenuhi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dalam kegiatan operasionalnya, serta membantu meningkatkan kinerja pemerintah dan kualitas hidup komunitas lokal secara keseluruhan.

Pemerintah, khususnya Menteri Sandiaga Uno, mendorong PT. Icer Indonesia untuk berpartisipasi dalam CSR dengan bermitra dengan Kampung *Heritage*. Meskipun produsen cat Dulux memberikan komitmen tertulis, pihak swasta belum merumuskan rencana konkret atau metode kelembagaan untuk melaksanakan program CSR ini. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dengan Kampung *Heritage* sangat tergantung pada inisiatif pemerintah.

Dampak Yang Dihasilkan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Berbasis *Collaborative Governance*

1. Dampak Ekonomi

a) Dampak Positif

Penerapan *collaborative governance* yang efektif di Kampung *Heritage* Kayutangan telah menciptakan prospek ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Masyarakat setempat terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pariwisata dan mendapatkan keuntungan finansial dari keterlibatan tersebut. Konsep *collaborative governance* juga memungkinkan warga untuk menciptakan lapangan kerja tanpa harus meninggalkan desa mereka. Dengan demikian, mereka dapat tinggal di komunitas mereka sambil tetap memperoleh penghasilan dari sektor

pariwisata. Ini merupakan contoh nyata dari pemberdayaan ekonomi yang berhasil dicapai melalui kolaborasi yang efektif antara berbagai mitra, di mana penduduk lokal mendapatkan akses langsung ke sumber pendapatan baru.

b) Dampak Negatif

Temuan bahwa pariwisata dapat meningkatkan aktivitas kriminal menunjukkan bahwa *collaborative governance* perlu mencakup aspek keamanan dan pencegahan kejahatan. Selain itu, peningkatan biaya hidup akibat kenaikan harga produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung berdampak signifikan. Ketidakstabilan jumlah pengunjung juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi dan psikologis, yang menekankan pentingnya perencanaan yang teliti dalam konteks *collaborative governance*.

2. Dampak Sosial Budaya

a) Dampak Positif

Peningkatan popularitas Kayutangan di kalangan wisatawan, terutama wisatawan asing, telah meningkatkan kesadaran mereka terhadap budaya dan sejarah lokal, yang berdampak positif pada pelestarian budaya. Selain itu, kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata telah menghasilkan program pelatihan yang memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, seperti kemampuan berbahasa Inggris, yang meningkatkan interaksi dengan wisatawan dan mempersiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan dinamika pariwisata internasional.

b) Dampak Negatif

Karena dampak negatif sosial dan budaya yang ditimbulkannya, pengelolaan pariwisata yang berbasis kerja sama pemerintah menghadapi banyak tantangan. Salah satu efek negatif yang disebutkan adalah dampak dari masuknya budaya lain melalui pariwisata, yang memengaruhi gaya hidup anak-anak setempat dengan membawa kebiasaan sosial dan tradisi baru. Selain itu, data menunjukkan bahwa rasa aman dan kenyamanan masyarakat menurun, yang berarti banjir pengunjung dapat mengganggu suasana yang tenang dan damai. Hal ini juga menyebabkan fenomena ketidakpedulian sosial di antara orang-orang, yang menyebabkan mereka merasa jauh dan tidak peduli dengan orang lain.

3. Dampak Lingkungan Berkelanjutan

a) Dampak Positif

Pengelolaan pariwisata yang berbasis pada *collaborative governance* memberikan

dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Pertama, peningkatan jumlah wisatawan telah meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan para otoritas. Kedua, pendekatan *collaborative governance* memfasilitasi pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk menangani pertumbuhan jumlah wisatawan. Terakhir, keberlangsungan desa dalam jangka panjang sangat tergantung pada komitmen yang kuat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, yang dapat ditanamkan melalui pengelolaan pariwisata berbasis *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku

b) Dampak Negatif

Pengelolaan pariwisata berbasis *collaborative governance* menghadapi tantangan besar dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Kasus vandalisme dan kerusakan infrastruktur akibat lalu lintas wisatawan yang tinggi menunjukkan bahwa fasilitas umum menghadapi tekanan fisik yang signifikan. Selain itu, meningkatnya jumlah sampah makanan yang dihasilkan oleh konsumsi wisatawan mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan sampah lokal mungkin tidak mampu menangani volume sampah yang meningkat.

Collaborative governance perlu mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif lingkungan, seperti masalah infrastruktur dan pengelolaan limbah. Ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, termasuk mendidik wisatawan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, dampak negatif ini dapat mengancam tujuan utama *collaborative governance*, yaitu memberikan pengalaman wisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pengelolaan objek wisata berbasis Collaborative Governance

1. Faktor Pendukung

a) Internal

Masyarakat memiliki potensi untuk bertransformasi melalui pembangunan dan perubahan menuju arah yang lebih baik. Kearifan lokal, termasuk artefak dan bangunan bersejarah, menjadi daya tarik yang signifikan bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pengelolaan yang menekankan pelestarian elemen budaya ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam *collaborative governance*.

b) Eksternal

Keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata tidak hanya bergantung pada partisipasi dari dalam, seperti organisasi pariwisata masyarakat (pokdarwis) dan pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari pihak ketiga. Pihak swasta berkontribusi tidak hanya dengan bantuan materi dan keuangan, tetapi juga dalam membangun kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, *collaborative governance* membutuhkan integrasi dan kerjasama antara berbagai mitra, baik dari internal maupun eksternal, untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata.

2. Faktor Penghambat

a) Internal

Masalah internal yang menghambat pengelolaan pariwisata berbasis *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan adalah kurangnya kesepakatan di antara penduduk setempat. Beberapa warga masih merasa ragu untuk sepenuhnya mendukung pengelolaan pariwisata dan sering kali bergantung pada arahan dari tim pengelola, yang menyebabkan komunikasi yang tidak efektif dan kurang terencana. Selain itu, perilaku pengunjung juga dapat menjadi kendala, sehingga pemangku kepentingan perlu menetapkan mekanisme yang efisien untuk mengatur perilaku mereka dan menjaga ketertiban selama kunjungan. Masalah-masalah ini menekankan perlunya metode koordinasi dan komunikasi yang lebih baik, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pelatihan dan program penyadaran, serta langkah-langkah pengendalian pengunjung yang efektif.

b) Eksternal

Salah satu faktor eksternal yang menghambat pengelolaan pariwisata berbasis *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan adalah adanya persaingan antara berbagai merek cat yang ingin menerapkan program serupa di area tersebut. Persaingan ini menyulitkan upaya untuk membangun kolaborasi yang kuat dengan mitra dari sektor swasta, yang merupakan elemen penting dalam pendekatan tata kelola kolaboratif. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk merancang solusi yang memungkinkan

koordinasi lebih baik dalam menyelaraskan tujuan, menciptakan perjanjian kolaborasi yang jelas, atau membentuk forum koordinasi yang memfasilitasi diskusi terbuka mengenai kepentingan masing-masing merek. Dengan strategi ini, diharapkan persaingan dapat dikelola secara konstruktif tanpa mengorbankan efektivitas kemitraan dalam pengelolaan pariwisata.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kampung *Heritage* Kayutangan),” peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengacu pada rumusan masalah pertama mengenai strategi pengelolaan pariwisata berbasis *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata di kampung ini dilakukan melalui pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah RW dan Kelurahan Kauman telah melaksanakan rencana yang mencakup pelatihan untuk masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pariwisata berkelanjutan. Selain itu, upaya pengelolaan ini lebih difokuskan pada penguatan ekonomi lokal, terutama melalui dukungan terhadap UKM, untuk memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan potensi wisata yang ada.
2. Mengacu pada rumusan masalah kedua mengenai dampak pengelolaan pariwisata berbasis *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari manajemen berbasis *collaborative governance* terlihat dengan jelas dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dihasilkan dari partisipasi aktif mereka dalam pengelolaan pariwisata. Namun, tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan menghadapi berbagai kendala signifikan, seperti vandalisme dan kerusakan infrastruktur akibat tingginya jumlah wisatawan. Konsekuensi negatif lainnya adalah meningkatnya volume sampah, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur.
3. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan

objek wisata berbasis *collaborative governance* di Kampung *Heritage* Kayutangan, baik faktor pendukung maupun penghambat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja manajemen pariwisata. Keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor swasta, menjadi sumber dukungan utama. Keinginan masyarakat untuk menerima perubahan dan berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata merupakan aset penting yang mendukung keberhasilan *collaborative governance*. Namun, tantangan besar muncul dari ketidaklibatan beberapa anggota masyarakat yang kurang mendukung kegiatan pengelolaan pariwisata. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antara manajemen dan masyarakat sering kali menghambat koordinasi serta pelaksanaan kebijakan yang tepat. Tantangan tambahan meliputi masalah keamanan, kebersihan, dan pemahaman wisatawan tentang pengelolaan lingkungan, yang semuanya dapat menghalangi pencapaian potensi penuh dari *collaborative governance* dalam manajemen pariwisata.

Saran

Berdasarkan analisis tentang *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kampung *Heritage* Kayutangan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Memperkuat Kolaborasi Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat.
Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata di Kampung *Heritage* Kayutangan telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pihak melalui pendekatan yang lebih terstruktur, seperti penyusunan rencana kerja yang melibatkan semua pemangku kepentingan dengan cara yang transparan dan berkelanjutan.
2. Pengembangan Produk Wisata dan UMKM
Pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata setempat perlu menjalin kemitraan dengan UMKM untuk mengembangkan pariwisata dan produk lokal. Salah satu rencana yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan pemasaran produk melalui digitalisasi dan *e-commerce*, sambil juga meningkatkan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif di pasar. Kerjasama ini akan memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat dan menciptakan peluang kerja baru.

3. Penanganan Dampak Negatif dan Permasalahan Pengelolaan Wisata
Perkolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok peduli lingkungan diperlukan untuk mengatasi konsekuensi buruk seperti masuknya budaya lain dan pengelolaan sampah yang buruk. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan aturan yang ketat untuk menjaga kebersihan dan melestarikan budaya setempat, serta program sosialisasi lingkungan bagi penduduk setempat. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat membantu sektor swasta mengelola sampah dan pelestarian lingkungan.
4. Pengembangan Wisata sebagai Pilar Ekonomi Lokal
Pengembangan UMKM di Kampung *Heritage* Kayutangan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan pelatihan usaha dan akses permodalan kepada para pelaku UMKM. Ini akan berdampak positif pada masyarakat setempat dengan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan variasi penawaran wisata yang menarik bagi wisatawan.
5. Meningkatkan Kerja Sama dengan Sektor Swasta
Contoh kerja sama tim yang baik adalah bekerja sama dengan perusahaan swasta seperti Cat Dulux, yang mendanai mural di Kampung *Heritage* Kayutangan. Di masa mendatang, kerja sama dengan mitra sektor swasta harus diperkuat melalui skema sponsor untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan tampilan yang lebih baik di daerah tersebut. Salah satu efek dari strategi ini adalah peningkatan daya tarik tempat wisata, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah pengunjung dan pendapatan pariwisata.
6. Pelestarian Kearifan Lokal dan Peningkatan Infrastruktur
Setiap rencana pengelolaan harus memprioritaskan pelestarian benda-benda bersejarah dan bangunan khas Kampung *Heritage* Kayutangan. Untuk menerapkan pendekatan pelestarian ini, diperlukan kerja sama dengan lembaga budaya dan masyarakat setempat, serta partisipasi masyarakat sepanjang proses perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, Kampung *Heritage* Kayutangan akan menjadi destinasi wisata penting yang dapat bersaing di seluruh dunia dengan meningkatkan infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas pariwisata, dan ruang publik.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Ahadiat, Ayi. 2010. *Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritis Multi Perspektif*.

Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Eka, Yudha Nugraha. 2021. *Buku Ajar Pariwisata Berbasis Masyarakat: Konsep dan Praktik*. Purwokerto Selatan. CV. Pena Persada.

Fathoni, M. 2023. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sumatra barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. Cetakan keempat

Handayani Asih., Eddy Sarwono Aris. (2021). *Buku Ajar Manajemen Strategis*. Surakarta. Unisri Press.

Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing. Sumatera Utara.

Nazarudin. 2018. *Manajemen Strategik*. Palembang. CV. Amanah.

Noor, Muhammad. 2020. *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. Yogyakarta. CV. Bildung Nusantara.

Nugroho, R. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang. Universitas Diponegoro Press.

Nyoman, I ,Sukma. *Buku Ajar: Pariwisata Berkelanjutan*. Sustain-Press.

Mahriani, Elida. 2020. *Manajemen Pariwisata: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Bandung. Widina Bhakti Persada.

Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muryani, Chatarina. 2020. *Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta. CV. Pramudita Press.

Rahman, Abd., Radjab E. 2016. *Manajemen Strategi*. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sudiantini, Dian. (2022). *Manajemen Strategi*. Banyumas. CV. Pena Persada.

- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunarta, Nyoman. 2017. Pariwisata Berkelanjutan. Bali. Cakra Press.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Yatminiwati, Mimin. 2019. Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa. Lumajang. Widya Gama Press.

Undang-Undang:

- UU No. 10 Tahun 2009. (2009). "Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Database Peraturan | JDIH BPK
- Pemerintah Walikota Malang. (2017). Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Malang. (2021). Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35).
- Peraturan Menteri Pariwisata. (2016). Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan. Menteri Pariwisata Republik Indonesia.
- PERMEN PAR No.14 Thn 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Sumber Jurnal:

- Aulia, Irfan. 2020. Pengaruh Pariwisata Berkelanjutan Terhadap Pendapatan Masyarakat Gampong Nusa Aceh Besar. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Aini Miftakhul., Afifuddin., Wulan Sekarsari Retno. (2022). Analisis SWOT Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Respon Publik. 16 (4) : 16-24.

- Alisa Shinta P., Muchsin Slamet., Wulan Sekarsari Retno. (2023). Dampak Pembangunan Wisata Kayutangan Heritage Terhadap Kawasan Kumuh Di Daerah Kayutangan Kota Malang (Studi Kasus Zona II Wisata Kayutangan Heritage Kota Malang). Jurnal Respon Publik. 1 (11) : 62-70.
- Aisyah Riska., Muchsin Slamet., Khoiron. (2021). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Kali Cemplong Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Jurnal Respon Publik. 15 (5): 30-37.
- Agung Achmad., Muchsin Slamet., Zainal Agus. (2022). Pengembangan Menuju Desa Wisata Di Desa Penambangan Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso). Jurnal Respon Publik. 16 (10) : 27-33.
- Baggio, R., Scott, N., & Cooper, C. (2019). Tata Kelola Destinasi Pariwisata: Kerangka Analisis. Jurnal Pariwisata Berkelanjutan. 27 (9) : 1109-1128.
- Delpiero Ginting, M. D. Pendekatan *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Asdaf Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Program Studi Politik Indonesia Terapan.
- Effendi, M (2021). Tata Kelola Kolaborasi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Indonesia. Jurnal Inovasi Sektor Publik. 105-138
- Hasanah Mauizatul. 2017. Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi). Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. Jurnal Jejaring Administrasi Publik.
- I Wayan Raymundus R. (2018). Perencanaan Manajemen Strategis Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi

- Kasus pada KRL Commuter Liner Bogor-Jakarta). *Bussiness Management Journal*. 14 (2) :75-153.
- Jamal, TB. (2009). Teori kolaborasi dan praktik pariwisata di kawasan lindung: Pemangku kepentingan, penataan dan keberlanjutan. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*. 17(2) : 169-189.
- Junita Frida., Umi Nurul., Wulan Sekarsari Retno. (2023). Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPOPAPAR) dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo, Jawa Timur. *Jurnal Respon Publik*. 17 (13) : 57-69.
- Kurniawan, T. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik : Dari Perilaku Model Klasik dan NPM Ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 7 (1) : 16-17.
- Kusuma Indra P., Muchsin Slamet., Zainal Agus. (2022). Strategi Pengelolaan Wisata Buper Bedengan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Perum Perhutani KPH Malang dan Pengelola Wisata (Studi Kasus Wisata Buper Bedengan Desa Solorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*. 16 (7) : 34-41.
- Nasrulhaq. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Universitas Muhammadiyah Makassar. *Unismuh.ac.id*.
- Nawawi, Ahmad, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangkritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol.5 No.2.
- Rachmadi, Hari. 2016. Model Pengambilan Keputusan Berwisata. *Jurnal Media Wisata*. Volume 14, Nomor 2.
- Raharjana, D. T. (2005). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya (Kajian Etnoekologi Masyarakat Dusun Ketingan, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Winarno Tedy., Wulan, Sekarsari Retno. 2018. Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi Dan Manajemen Di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Public Sector Innovations*. 2 (2) : 82-87.
- Susilawati, 2016. Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Bira Sebagai Sumber Unggulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.2 No.3.
- Saukad Rudi, Muhammad. 2023. Manajemen Pariwisata Religi Berbasis Moderasi Beragama Di Islamic Center Mataram. *Jurnal Manajemen Dakwah*. Universitas Islam Negeri Mataram. *Uinmataram.ac.id*.
- Yulyana Dewi, L. N. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. *Undiknas.ac.id*.
- Zaenuri, Muhammad. 2016. Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance: Studi Kasus Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Kabupaten Sleman. Universitas Brawijaya Malang. *Ub.ac.id*.
- Zaenuri, Muchamad. 2017. Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi di Kabupaten Sleman). Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Sumber Website:**
Copyright (2022). Politeknik Negeri Malang. Sejarah Kampoeng Heritage Kajoetangan. <https://www.heritage-kajoetangan.com/profil> (Diakses 15 Oktober 2023)
- Pemerintah Kota Malang. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. (2021). Pesona dan Cerita Bangunan Tua Kampung Kayutangan Malang. <https://malangkota.go.id/2021/08/05/pesona-dan-cerita-bangunan-tua-kampung-kayutangan-malang/> (Diakses 20 Oktober 2023)
- Sumber internet:**
Copyright (2022). Politeknik Negeri Malang. Sejarah Kampoeng Heritage Kajoetangan. <https://www.heritage-kajoetangan.com/profil> (Diakses 15 Oktober 2023)

- Pemerintah Kota Malang. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. (2021). Pesona dan Cerita Bangunan Tua Kampung Kayutangan Malang.
<https://malangkota.go.id/2021/08/05/pesona-dan-cerita-bangunan-tua-kampung-kayutangan-malang/> (Diakses 20 Oktober 2023)
- Puspaningtyas, Anggraeny. (2022). Collaborative Governance: Sebuah Paradigma?.
<https://publik.untagsby.ac.id/berita-430-collaborative-governance-sebuah-paradigma.html> (Diakses 15 Oktober 2023)